



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Sosial RI; 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 3. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji; 4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 3 Februari 2026
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Penanggulangan dan Mitigas Bencana di Indonesia; 2. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 28 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 7 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Wakil Menteri Sosial RI beserta Jajaran; 4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta Jajaran; 5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji beserta Jajaran; 6. Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.49 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., dan H. Abdul Wachid sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sosial RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan agenda **Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Indonesia dan Isu-Isu Aktual**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Wakil Menteri Sosial RI, Kepala BNPB, Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Baznas untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan dan mitigasi bencana di Indonesia.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Wakil Menteri Sosial RI mengenai:
 - a) Total bantuan sosial reguler triwulan 1 tahun 2026 yang disalurkan ke warga terdampak bencana di Sumatera sebanyak 1.763.038 KPM dengan total anggaran sebesar Rp1.832.738.125.000, - (*satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
 - b) Realisasi anggaran kebencanaan Kementerian Sosial RI tahun 2025 sebesar Rp516.988.321.588,- (*lima ratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sekitar 99,55 % dari pagu anggaran sebesar Rp519.338.318.000,- (*lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*).

- c) Target dan anggaran bencana tahun 2026 sebesar Rp179.341.227.000,- (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
 - d) Usulan tambahan anggaran bencana nasional tahun 2026 sebesar Rp845.000.758.000,- (*delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala BNPB mengenai:
- a) Progres penanganan banjir dan longsor :
 - Provinsi Aceh dari 18 Kab/Kota terdampak terdapat 15 Kab/Kota sudah masuk transisi darurat dan 3 kabupaten masih dalam fase tanggap darurat.
 - Provinsi Sumatera Utara dari 14 Kab/Kota terdampak semuanya sudah masuk transisi darurat menuju pemulihan.
 - Provinsi Sumatera Barat dari 14 Kab/Kota sudah masuk fase transisi darurat menuju pemulihan.
 - b) Usulan anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar Rp936.611.706.000, - (*sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam ribu rupiah*).
 - c) Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan tujuan menghambat pertumbuhan awan di wilayah Bekasi, Depok, Bogor, dan di wilayah perairan utara Banten dan DKI Jakarta serta daerah-daerah yang lainnya.
4. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala BPKH mengenai:
- a) Penyaluran program kemaslahatan untuk merespon bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebesar Rp14,58 miliar.
 - b) Rencana penyaluran berbagai kebutuhan lanjutan dari program tanggap bencana kemaslahatan BPKH tahun 2026.
5. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Ketua Baznas mengenai :
- a) Anggaran bantuan bencana Baznas RI sebesar Rp77.875.000.000,- (*tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - b) Progres bantuan pemulihan pasca bencana Sumatera bidang sosial keagamaan sebesar Rp80.500.000.000, - (*delapan puluh miliar lima ratus juta rupiah*)

- c) Realisasi program respon bencana Sumatera sebesar Rp11.588.252.596,-
(sebelas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Ketua Baznas memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain, sebagai berikut:
- a) Membuat *road map* untuk memitigasi potensi terjadinya bencana di Indonesia.
 - b) Mendukung penambahan anggaran kebencanaan pada Kementerian Sosial RI dan anggaran rutin BNPB tahun 2026.
 - c) Mempercepat penyelesaian proses hunian sementara dan hunian tetap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelum Ramadhan 1447 H/2026 M serta daerah-daerah lainnya yang terdampak bencana.
 - d) Merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Komisi VIII DPR RI mendesak Wakil Menteri Sosial RI, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Ketua Baznas untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan Anggota dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI secara lengkap paling lambat tanggal 12 Februari 2026.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.38 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. ANSORY SIREGAR